

BAB II

MANAJEMEN PELAKSANAAN DAN BIMBINGAN IBADAH HAJI

A. Bimbingan Ibadah Haji dan KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji)

1. Bimbingan Ibadah Haji

Bimbingan berasal dari kata *guidance* berasal dari kata kerja *to guide* dari bahasa Inggris yang berarti menunjukkan. Secara harfiah bimbingan berarti menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain kearah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya dimasa kini ke masa yang akan datang (Ariffin, 1982: 1). Bimbingan adalah pertolongan yang di berikan oleh seseorang yang telah di persiapkan dengan pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, yang di perlukan untuk menolong atau membimbing orang lain (Aryamti, 1985: 9). Bimbingan rohani Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (Musnamar, 1992: 5).

Haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan beberapa amalan antara lain wukuf, tawaf, sa'i, dan amalan lainnya, pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharapkan ridhoNya (Depag, 2003: 7). Umat islam yang hendak melaksanakan ibadah haji harus memenuhi persyaratan yang ada dalam Al-Quran yakni beragama islam, baligh (dewasa), aqil (ber akal sehat), merdeka (bukan budak) dan istitho'ah (mampu) (Awaludin, 2009: 13).

Setelah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan ibadah haji calon haji harus memenuhi rukun haji. Rukun haji adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat dilakukan dengan dam dan jika di tinggalkan maka hajinya tidak sah (Depag, 2003: 7). Rukun haji tersebut yaitu berihrom, melakukan wukuf di Arofah, melakukan thowaf ifadoh atau thofah haji, melaksanakan Sa'i dan bertahalul (mencukur rambut) dan harus terib (Awaludin, 2009: 14).

Sedangkan wajib haji adalah ketentuan yang apabila dilanggar atau amalan ada yang tidak terpenuhi maka hajinya tidak sah, dan akan sah hajinya apabila membayar dam (denda). Beberapa amalan yang wajib dilaksanakan jamaah yaitu melakukan niat dari Miqot, melakukan Mabit atau bermalam di Mudzdalifah untuk melempar jumroh aqobah, melaksanakan mabit di Mina, melontar jumroh ula,

wustho, dan aqobah dan melakukan thowah Wada' atau perpisahan (Awaludin, 2009: 14-15).

Jadi Bimbingan ibadah haji adalah petunjuk atau penjelasan cara mengerjakan dan sebagai tuntunan hal-hal yang berhubungan dengan rukun, wajib, dan sunnah haji dengan menggunakan miniatur ka'bah dan dilaksanakan sebelum berangkat ke tanah suci (Depdiknas, 2010: 624).

a. Tujuan Bimbingan Ibadah Haji

Dilaksanakannya bimbingan ibadah haji kepada jamaah haji Indonesia mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Memberikan pembinaan, pelayanan, perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen yang baik, agar pelaksanaan kegiatan ibadah haji berjalan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman sesuai dengan tuntutan agama serta jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji dengan mandiri untuk memperoleh haji yang mabrur (Depag, 2003: 1).
- 2) Tujuan bimbingan ibadah haji secara massal adalah calon jamaah haji mendapat gambaran umum secara jelas kebijaksanaan pemerintahan tentang perhajian, sehingga calon jamaah haji mempunyai persiapan yang baik dalam melaksanakan ibadah haji. Sedangkan bimbingan kelompok bertujuan agar calon jamaah haji dapat memahami secara sempurna segala aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah haji meliputi aspek mental, phisyikis, manasik haji baik teori maupun praktek dan petunjuk perjalanan sehingga semua calon jamaah haji mampu melaksanakan segala kegiatan ibadah haji secara mandiri dan sempurna (Depag RI, 2001: 13).

b. Tahapan Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Haji

- 1) Bimbingan Di Tanah Air
 - a) Pembimbingan massal di Kabupaten/Kota

Pembimbingan ini dilaksanakan dalam dua bentuk yaitu pertama pembukaan bimbingan manasik haji di Kabupaten. yang dilaksanakan satu bulan setelah penutupan pendaftaran calon haji. Kedua penutupan dan pembekalan terakhir bimbingan ibadah haji yang dilaksanakan satu bulan sebelum calon jamaah haji melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi.

Bimbingan Kelompok

b) Pembimbingan kelompok

Pembimbingan ini dilaksanakan oleh pertama panitia pelaksana pembimbingan calon jamaah haji Kabupaten/Kota yang di bentuk oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota setempat yang bekerjasama dengan Ormas Islam dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). Kedua oleh KBIH yang mendapatkan ijin dari pemerintah, panitia KBIH dibantu para pembimbing yang telah dilatih atau alim ulama/ustadz yang mengetahui manasik haji dan tatacara melaksanakannya.

2) Bimbingan Di Pesawat Terbang

Selama jamaah di pesawat diberikan pembimbing oleh TPIH, TPHI, Karu/Karom, Alim ulama yang ada dalam kloter yang bersangkutan dengan kegiatan pengarahan/amanah pelepasan saat pemberangkatan haj, ceramah agama yang berkaitan dengan ibadah haji yakni waktu keberangkatan dengan tema perjalanan suci dan waktu kepulangan dengan melestarikan haji mabrur, embimbingan tayamum dan shalat di pesawat dan pembimbingan dan penjelasan yang berkaitan dengan penyelesaian dokumen dan barang bawaan para jamaah (Depag RI, 2001: 21-22).

3) Bimbingan Pemantapan Di Embarkasi

Embarkasi merupakan tempat pemberangkatan calon jamaah haji sebelum berangkat ke Arab Saudi. Pemantapan dimaksudkan penyegaraan kembali pengetahuan jamaah haji tentang materi pembimbingan perjalanan manasik haji yang telah diperoleh calon jamaah haji di daerahnya. Pemantapan di embarkasi dilaksanakan sesuai dengan kondisi keberadaan calon jamaah haji di asrama haji embarkasi (Depag RI, 2001: 32). Kegiatan yang disampaikan dalam bimbingan pemantapan di asrama haji sebagai berikut manasik haji, praktek/peragaan manasik haji, kesehatan haji, akhlakul karimah dan adat istiadat di Arab Saudi, pemantapan tugas karu dan karom, penjelasan tentang penerbangan haji, konsultasi haji (Depag RI, 2001: 32-33).

4) Bimbingan Di Arab Saudi

Selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi berpartisipasi untuk meraih ibadah haji yang sah, lancar dan sempurna. Adapun bentuk pembimbingan selama pelaksanaan ibadah haji meliputi :

- a) Bimbingan perorangan dan bimbingan kelompok diberikan kepada calon jamaah haji yang bersangkutan secara perorangan oleh petugas operasional yang mendampingi melalui konsultasi, tanya jawab, dan bimbingan langsung dalam prakteknya sesuai dengan kondisi dan sesuai kebutuhan jamaah haji.
- b) Bimbingan Massal dapat dilaksanakan khusus intern kelompok terbang, maupun bersamaan dengan kelompok yang lebih besar. Bimbingan ini dianggap sangat penting dan strategis saat menjelang ihram, menjelang haji, wukuf, melontar jumrah dan lainnya sesuai dengan kebutuhan jamaah haji (Depag RI, 2001: 39-40).

c. Materi Dan Metode Bimbingan Ibadah Haji

Materi dan metode yang digunakan dalam pola pembinaan calon jamaah haji disesuaikan dengan kondisi dan tingkat pengetahuan calon jamaah haji, sehingga akan mempermudah pemahaman calon jamaah haji dalam menerima materi tentang pendalaman manasik haji.

- 1) Materi bimbingan ibadah haji meliputi pemanduan perjalan haji, bimbingan manasik haji, tanya jawab persoalan haji, doa dan dzikir ibadah haji, dan penegasan pengelompokan (regu, rombongan, dan kloter), kesehatan haji, akhlakul karimah dan pengenalan budaya adat istiadat di Arab Saudi dan peragaan manasik haji meliputi cara berpakaian ihram untuk pria atau wanita, cara melakukan thawaf, cara melakukan sa'i, cara memotong rambut/bercukur, cara melontar jumrah, selain itu juga diperagakan cara bertayamum dan cara melaksanakan shalat di pesawat (Depag RI, 2001: 10-11).
- 2) Metode bimbingan ibadah haji adalah cara pembimbing menyampaikan materi bimbingan kepada calon jamaah haji agar lebih mudah menyerap, mengerti dan memahami materi bimbingan dengan mudah. Metode yang digunakan dalam pembimbing sebagai berikut:
 - (1) Home *visit* atau berkunjung ke rumah adalah pembimbing mendatangi calon jamaah haji di rumahnya atau kelompok kecil dari rumah ke rumah. Calon jamaah haji diajak berdialog dan untuk mempelajari buku materi bimbingan haji.
 - (2) Ceramah adalah penjelasan tentang haji yang disampaikan oleh pembimbing kepada calon jamaah yang berkumpul secara klasikal

- (3) Tanya jawab dilaksanakan sebagai kelanjutan ceramah untuk memberikan pemahaman yang sempurna kepada calon jamaah haji terhadap materi yang telah disampaikan.
- (4) Peragaan yaitu visualisasi dari setiap pembelajaran yang dicontohkan oleh pembimbing dan diperhatikan serta diperagakan oleh para calon jamaah haji.
- (5) Praktek lapangan yaitu calon jamaah haji secara bersama-sama mempraktek seluruh pelaksanaan manasik haji dari awal sampai selesai yang dipandu oleh pembimbing calon jamaah haji. Metode ini diharapkan sering dilakukan.
- (6) Diskusi adalah bertukar pikiran untuk mncapai sesuatu atau beberapa kesimpulan pemahaman calon jamaah haji terhadap materi bimbingan ibadah haji.
- (7) Sarasehan atau pertemuan satu kelompok adalah calon jamaah haji secara bersama-sama mempelajari manasik haji dengan pembimbing haji yang bertindak sebagai moderator dan fasilliator atau sebagai narasumber yang sekaligus memandu jalannya pertemuan.
- (8) Konsultasi yaitu calon jamaah haji aktif bertanya tentang masalah perhajian kepada pembimbing haji dan pembimbing memberikan penjelasan dan bimbingan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh calon jamaah haji (Depag RI, 2001: 12-13).

2. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)

Kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) adalah lembaga/yayasan sosial islam dan pemerintah yang bergerak dibidang haji yang berhubungan dengan calon jamaah haji baik dalam bimbingan ditanah air, saat pelaksanaan ibadah haji di Arab saudi hingga pasca ibadah haji. KBIH sebagai lembaga sosial keagamaan (non pemerintahan) yang telah memiliki legalitas pembimbingan melalui undang-undang dan telah diperjelas melalui wadah khusus dalam struktur baru Departemen Agama dengan Subdit Bina KBIH pada Direktorat Pembinaan Haji (Puslitbang, 2007: 17).

KBIH mempunyai tugas membantu pemerintah dalam penyelenggaraan bimbingan ibadah haji, sehingga calon jamaah haji mengerti betul tentang manasik haji dan akhirnya menjadi haji mabrur (Rohman, 2007: 1). Dalam pasal 24 ayat 1

disebutkan bahwa KBIH hanya melaksanakan pembimbingan ibadah haji, bukan sebagai penyelenggaraan ibadah haji. KBIH diberikan hak dan kewajiban tertentu, seperti dibolekan memungut biaya tambahan diluar BPIH dengan persyaratan yang telah ditentukan. Sementara kewajiban pokok KBIH diluar bimbingan ibadah haji adalah membantu kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pelayanan kepada jamaah haji yang dilakukan oleh petugas haji pemerintah (Direktorat, 2005: 5). Di Indonesia, pelaksanaan ibadah haji tidak terlepas dengan adanya KBIH. KBIH mempunyai peran yang berhubungan dengan jamaah karena membantu masyarakat dalam tatacara ibadah, perjalanan ibadah haji dan meneguhkan iman dan kepercayaan untuk menjadi yang mabrur. KBIH juga bertanggung jawab mengantar dan membimbing jamaah saat berada di tanah suci dan melakukan ibadah haji (Mudjahirin, 2004: 27).

a. Tujuan KBIH

KBIH menyelenggarakan ibadah haji sesuai dengan tujuan yang ada dalam Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2008 pada Bab II Pasal 3 yaitu penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

b. Tugas dan Fungsi KBIH

KBIH mempunyai tugas dan fungsi yang mendasari kegiatan yang dilakukan dari pemerintah yang harus dijalankan sebagai berikut:

- 1) KBIH mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a) Menyelenggarakan atau melaksanakan bimbingan ibadah haji tambahan di tanah air maupun sebagai bimbingan pembekalan melaksanakan ibadah haji di lapangan atau di Arab Saudi.
 - b) Melaksanakan pelayanan konsultasi, informasi, penyelesaian kasus ibadah bagi jamaah di tanah air dan tanah suci.
 - c) Menumbuh kembangkan rasa percaya diri dalam penguasaan manasik haji jamaah yang dibimbingnya
 - d) Memberikan pelayanan yang bersifat pengarah, penyuluhan, dan himbauan untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan jinayat haji (pelanggaran-pelanggaran haji) (Puslitbang, 2007: 18).

- 2) Adapun fungsi KBIH dalam bimbingan ibadah haji meliputi :
 - a) Sebagai penyelenggara atau pelaksana pembimbingan haji tambahan di tanah air sebagai bimbingan pembekalan penyelenggara atau pelaksana pembimbingan lapangan di Arab Saudi
 - b) Sebagai pelayananan, konsultasi, dan sumber informasi perhajian
 - c) Sebagai motivator bagi jamaahnya terutama dalam hal-hal penguasaan ilmu manasik, keabsahan, dan kesempurnaan ibadah (Depag, 2003: 5).

B. Pelaksanaan

1. Manajemen Secara Umum

Secara etimologis, kata *manajemen* berasal dari Bahasa Inggris, yakni *management*, yang dikembangkan dari kata *to manager*, yang artinya mengatur atau mengelola. Kata *manage* itu sendiri berasal dari Bahasa Italia, *maneggio*, yang diadopsi dari Bahasa Latin *managiare*, yang berasal dari kata *manus*, yang artinya tangan (Samsudin, 2006: 15). Istilah manajemen (*management*) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berada, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, ketatapengurusan administrasi (Choliq, 2011: 12).

Menurut T. Hani Handoko (2003: 8) manajemen merupakan proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi dengan maksimal. Menurut Hasibuan (2005: 1), manajemen hanyalah merupakan alat untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan (organisasi), karyawan dan masyarakat. Menurut G.R Terry, fungsi manajemen adalah *Planning, Organizing, Actuating, Controlling*. Sedangkan menurut John F. Mee fungsi manajemen diantaranya adalah *Planning, Organizing, Motivating dan Controlling*. Fungsi manajemen tersebut pada dasarnya harus dilaksanakan oleh setiap manajer secara berurutan supaya proses manajemen itu diterapkan secara baik (Hasibuan, 2005: 3-4).

2. Pelaksanaan

Peneliti mengambil fungsi manajemen sebagai pengerakan atau pelaksanaan dari kegiatan. Fungsi pelaksanaan sering disebut juga dengan *leading* (pengarahan), *motivating* (motivasi), *actuating* (pengerakan).

Menurut GR terry (2003: 17) pelaksanaan (*actuating*) mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan dapat tercapai. Sedangkan Stoner (1995: 12) berpendapat penggerakan atau pelaksanaan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tugas anggota kelompok atau organisasi secara keseluruhan. Fungsi penggerakan sebagai tindakan mengarahkan pekerjaan yang perlu dilaksanakan didalam sebuah organisasi. Karena itu, fungsi *actuating* berkaitan dengan fungsi manajemen lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian agar tujuan dapat tercapai (Choliq, 2002: 9).

a. Tujuan pelaksanaan

Setiap kegiatan dalam organisasi mempunyai tujuan yang berarti untuk kelangsungan hidup perusahaan. Adapun fungsi pelaksanaan (pengarahan) mempunyai tujuan agar dapat menjamin kontinuitas perencanaan, membudayakan prosedur standart, menghindari kemangkiran yang tak berarti, membina disiplin kerjakuualitas maupun kuantitasnya, dan membina motivasi yang terarah (Siswanto, 2006: 112-113).

b. Unsur-unsur pelaksanaan

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan (*actuating*) merupakan fungsi manajemen yang paling utama, karena fungsi *actuating* (penggerakan) berperan sebagai pengarahan yang diberikan atasan kepada karyawan untuk melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Fungsi pelaksanaan dapat mengimplementasikan kegiatan yang telah direncanakan dan dapat mewujudkan kegiatan dalam organisasi.

Fungsi *actuating* lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Menurut Handoko bahwa didalam unsur pelaksanaan kegiatan dipengaruhi oleh motivasi, komunikasi, kepemimpinan, perubahan dan perkembangan organisasi serta manajemen konflik (2003: 250). Sedangkan menurut Harold Koontz, dkk (1989: 92) fungsi pelaksanaan disebut dengan memimpin atau pimpinan, yang didalam fungsi memimpin dipengaruhi oleh motivasi, kepemimpinan dan komunikasi yang semua unsur tersebut berhubungan faktor manusia sebagai pelakasa.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori dari Harold Koontz yang berhubungan dengan pelaksanaan bimbingan ibadah haji. Komponen yang berhubungan dengan fungsi pelaksanaan dalam manajemen sebagai berikut :

1) Motivasi

a) Pengertian Motivasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi terdiri dari dua kata, yaitu motif dan aksi. Motif sendiri memiliki arti sebab-sebab yang menjadi dorongan tindakan seseorang, dasar pikiran atau pendapat, sesuatu yang jadi pokok. Sedangkan aksi memiliki arti gerakan, perkumpulan politik, tindakan, sikap (gerak-gerik, tingkah laku) yang dibuat-buat (Ratnaningsih, 2005: 12).

Motivasi merupakan kekuatan pendorong dari seseorang yang akan mewujudkan suatu perilaku guna mencapai kepuasan pada dirinya (Handoko, 2003: 252). Sedangkan motivasi diberikan untuk mempengaruhi perasaan, kehendak atau keinginan, kemauan atau dorongan individu dalam berperilaku dan bertindak mencapai tujuan (Siswanto, 2006: 25).

b) Tujuan Motivasi

Pemberian motivasi mempunyai tujuan dalam mempengaruhi bawahan atau orang lain untuk bekerja atau menjalankan tugas atau perintah dari atasan. Adapun tujuan motivasi adalah meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan, meningkatkan kedisiplinan karyawan, mengefektifkan pengadaan karyawan, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, meningkatkan loyalitas, kreativitas dan partisipasi karyawan, meningkatkan kesejahteraan karyawan, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya, meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku (Hasibuan, 2005:146).

c) Jenis-Jenis Motivasi

Malayu S.P Hasibuan (2005: 150) mengatakan bahwa jenis-jenis motivasi adalah sebagai berikut:

- (1) Motivasi Positif adalah manajer memotivasi (merangsang) bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar.

(2) Motivasi Negatif adalah manajer memotivasi bawahan dengan standar mereka akan mendapatkan hukuman, dengan motivasi negatif ini semangat bekerja bawahan dalam waktu pendek akan meningkat karena mereka takut dihukum, tetapi untuk jangka panjang dapat berakibat kurang baik.

d) Metode Motivasi

Cara memberikan motivasi menurut Malayu S.P. Hasibuan (2005: 149) mengatakan bahwa ada dua metode motivasi sebagai berikut:

(1) Motivasi langsung adalah motivasi yang diberikan secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya, jadi sifatnya khusus, seperti pujian, penghargaan, tunjangan hari raya, bonus dan bintang jasa.

(2) Motivasi tidak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah kerja atau kelancaran tugas sehingga para karyawan betah dan bersemangat melakukan pekerjaannya. Misalnya ruangan kerja yang nyaman, suasana pekerjaan yang serasi dan sejenisnya.

2) Kepemimpinan

a) Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin (*leader*) yang berarti seseorang yang menggunakan wewenang dan kepemimpinannya, mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagaimana pekerjaannya dalam mencapai tujuan organisasi (Hasibuan, 2009: 169). Kepemimpinan (*leadership*) adalah sebagai proses mempengaruhi seseorang untuk berusaha dalam mencapai tujuan dengan kemampuannya. Memimpin berarti membimbing, melaksanakan, mengarahkan, dan mendahului dalam kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan (Koontz, 1989: 147).

Pemimpin merupakan faktor penentu dalam meraih sukses bagi sebuah organisasi. Sebab pemimpin yang sukses akan mampu mengelola organisasi, dapat memengaruhi orang lain secara konstruktif, dan mampu menunjukkan jalan serta tindakan benar yang harus dilakukan secara bersama-sama.

b) Tugas dan Fungsi Pemimpin

Menurut G.R Terry mendiskripsikan pekerjaan seorang manajer atau pemimpin berdasarkan fungsi dalam manajemen yaitu:

Fungsi pokok dari seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu sebagai administrator dan sebagai manajer. Pemimpin dalam fungsi pokok sebagai seorang administrator adalah menetapkan kebijaksanaan umum yang mengikat organisasi dan menentukan tujuan secara menyeluruh yang hendak dicapai oleh organisasi yang dipimpinnya. Sedangkan sebagai seorang manajer berperan untuk melaksanakan semua kegiatan dalam rangka pencapaian organisasi menurut batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrator (Kayo, 2005: 32-34).

Seorang pemimpin mempunyai tugas dalam memimpin atau mengarahkan para bawahan yang dipengaruhi oleh wewenang atau kekuasaan pemimpin, kemampuan untuk memahami bahwa setiap manusia mempunyai motivasi yang berbeda pada waktu dan situasi yang tidak sama, kemampuan untuk mendorong karyawan untuk bertindak atau melaksanakan kegiatan dengan menciptakan yang baik dan dapat menimbulkan motivasi, gaya kepemimpinan yang diterapkan pemimpin akan menciptakan suasana yang nyaman dan aman pada karyawan sehingga dapat meningkatkan produktifitas kinerja dalam mencapai tujuan perusahaan (Koontz, 1989: 148).

c) Jenis atau Tipe Kepemimpinan

Dalam kepemimpinan seorang mempunyai cara memimpin sesuai dengan kriteria yang ada pada dirinya. Pemimpin dalam memimpin para bawahannya sering menggunakan kekuasaannya. Berikut ini jenis kepemimpinan yang berdasarkan kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin.

- (1) Pemimpin Otokrasi dipandang sebagai orang yang mengomando dan mengharapkan kepatuhan yang bersifat dogmatis dan positif, serta memimpin dengan kemampuan atau memberikan ganjaran atau hukuman (Koontz, 1989: 150).
- (2) Pemimpin Demokratis yang berorientasi pada manusia, dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Kepemimpinan ini menghargai potensi setiap individu mau mendengarkan nasihat dan

sugesti bawahan. Juga bersedia mengakui keahlian para spesialis dengan bidangnya masing-masing mampu memanfaatkan kapasitas setiap anggota seefektif mungkin pada saat-saat dan kondisi yang tepat (Kartono, 2006: 80-86).

- (3) Tipe paternalistis yaitu tipe kepemimpinan yang kebabakan, dengan sifat-sifat antara lain yaitu: 1). Dia menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak/belum dewasa, atau anak sendiri yang perlu dikembangkan, 2). Dia bersikap terlalu melindungi, 3). Jarang dia memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan sendiri.
- (4) Tipe militeristis mempunyai sifat pemimpin yang lebih banyak menggunakan system perintah/komando terhadap bawahannya keras sangat otoriter kaku dan seringkali kurang bijaksana, menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahan, komunikasi berlangsung hanya searah saja, tidak menghendaki saran, usul, sugesti dan kritikan-kritikan dari bawahannya (Kartono, 2006: 80-86).

3) Komunikasi

a) Pengertian Komunikasi

Komunikasi berasal dari bahasa latin yaitu *cum*, yang berarti kata depan yang artinya dengan atau bersama dan kata *umus* yang berarti sebuah kata bilangan yang berti satu. Secara harifah komunikasi berti pemberitahuan, pembicaraan, percakapan, petukaran pikiran atau berhubungan (Lestari, 2009: 5-6). Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari pengirim pesan kepada penerima dengan menggunakan tanda atau simbol yang sama baik oral maupun bukan oral. Dalam suatu organisasi komunikasi hal terpenting untuk menjalin hubungan dengan baik dalam struktur organisasi (Siswanto, 2006: 113).

Menurut Chester I. Barnard yang dikutip oleh Harold Koontz memandang komunikasi sebagai sarana penghubung antara orang di dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini merupakan fungsi dasar komunikasi, tanpa adanya komunikasi tidak mungkin akan terjadi aktifitas kelompok. Pentingnya komunikasi dalam suatu organisasi karena menyangkut peran koordinasi pekerjaan antara pemimpin dengan bawahan yang dapat dilakukan dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi bersama (1989: 169).

b) Tujuan Komunikasi.

Tujuan komunikasi dalam perusahaan adalah untuk mengadakan perubahan dan mempengaruhi tindakan bawahan dan untuk mencapai kesejahteraan perusahaan. Secara khusus komunikasi diperlukan untuk menetapkan dan menyebarluaskan tujuan perusahaan, menyusun rencana untuk mencapai tujuan, mengordinasi sumber daya manusia dan sumberdaya lainnya dengan cara yang efektif dan efisien, menyeleksi, mengembangkan dan menilai anggota organisasi, memimpin, mengarahkan, memotivasi, dan menciptakan suasana yang menimbulkan keinginan bawahan untuk berkontribusi dan mengendalikan prestasi (Koontz, 1989: 169-170).

c) Saluran Komunikasi

Berkomunikasi antara orang yang satu dengan yang lain dapat menjadikan komunikasi yang efektif dan dipengaruhi oleh tujuh unsur komunikasi yaitu pihak yang mengawali (komunikator), pesan yang disampaikan, saluran komunikasi, situasi komunikasi, gangguan komunikasi, pihak yang menerima komunikasi, umpan balik dan dampak dari komunikasi (Lestari, 2009: 18).

Saluran penyampaian informasi dalam suatu organisasi dapat dilakukan secara:

a) Sistem komunikasi vertikal

Komunikasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, adalah komunikasi dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan secara timbal balik. Dalam komunikasi vertikal, pimpinan memberikan instruksi-instruksi, petunjuk, informasi, penjelasan kepada bawahannya. Komunikasi yang lancar, terbuka dan saling mengisi merupakan mencerminkan sikap kepemimpinan yang demokratis. Komunikasi dari bawah terjadi manakala bawahan mengadakan kontak lisan maupun tulisan dengan manajer atau pemimpin (Siswanto, 2006: 113).

b) Sistem komunikasi horizontal

Komunikasi horizontal yaitu komunikasi yang terjadi pada orang-orang ditingkat yang sama dalam organisasi (Koontz, 1989: 150). Komunikasi secara mendatar antara anggota staff dengan anggota staff, karyawan sesama karyawan dan sebagainya. Komunikasi ini seringkali

berlangsung tidak formal, mereka berkomunikasi satu sama lain bukan pada waktu mereka sedang bekerja, melainkan pada saat istirahat atau waktu pulang kerja. Komunikasi ini terjadi antara departemen, unit, dan bagian dalam suatu hirarki organisasi, komunikasi ini terjalin untuk mencapai tujuan organisasi secara bersama (Siswanto, 2006: 113-114).

c) Sistem komunikasi diagonal

Komunikasi diagonal terjadi pada orang-orang pada tingkat yang berbeda yang tidak memiliki hubungan pelaporan langsung antara satu unit dengan unit yang lain (Koontz, 1989: 150).

C. Pedesaan

1. Pengertian Pedesaan

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.6, pasal 1: 2014). Ditinjau dari segi hukum dan ketatanegaraan, desa merupakan unit pemerintah terendah langsung dibawah kecamatan berdasarkan keputusan mendagri No. Sd.18/4/24 tanggal 12 Agustus 1969 (Sajagyo & Pudjiwat, 1989: 151).

Dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia No.22 Tahun 1988 menjelaskan bahwa desa adalah bentuk negara otonom yang terendah sesudah kota (Bahrein, 1996: 25). Daerah atau kawasan desa disebut dengan pedesaan. Desa dan pedesaan sebenarnya dapat terlihat dari sudut kota dan perkotaan, secara sederhana dapat dikatakan bahwa setiap permukiman yang bukan kota adalah desa (Bahrein, 1996: 28).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Di wilayah Indonesia kira-kira 80% merupakan pedesaan dan 20% merupakan perkotaan. Dimana seluruh wilayah Indonesia secara administrative terbagi menjadi desa-desa. Pada umumnya desa di tengah pulau atau desa pedalaman mempunyai permukiman yang terpusat dikelilingi oleh tanah untuk kegiatan ekonominya, seperti sawah, ladang, hutan dan sebagainya. Desa yang terletak di perbukitan sering mempunyai

pola pemukiman tersebar dengan kata lain pola permukiman dipengaruhi oleh faktor geografik seperti di daerah lembah, bukit, pinggiran sungai atau sungai, gurun, padang rumput, pinggir laut atau pantai (Bahrein, 1996: 71).

Ciri khas desa sebagai suatu komunitas pada masa lalu selalu berkaitan dengan kebersahajaan, keterbelakangan, tradisionalisme, subsistens, keterisolasian (Raharjo, 1999: 184). Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (UU No.6, pasal 1: 2014).

Masyarakat di daerah pedesaan yang bertempat tinggal di dataran rendah biasanya, pola kehidupan mereka adalah bercocok tanam di ladang dan sawah, disamping itu juga masyarakat bergantung pada hasil panen tanaman keras seperti, cengkeh, karet, dan kelapa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tjondronegoro dan Wiradi mengatakan bahwa fungsi sosial dari tanah sebagai tempat tinggal untuk memenuhi kebutuhan papan dan sumber pedapatan sebagai sandaran hidup para petani, tetapi juga mempunyai fungsi-fungsi sosial yang memungkinkan mereka melakukan interaksi dan berkembang (Kurnadi, 2012: 36).

2. Kehidupan Masyarakat Pedesaan

Selain sumber penghidupan masyarakat desa yang berasal dari pekerjaan kepegawaian, perdagangan, pertukangan, peternakan dan bertani, bertani merupakan salah satu mata pencaharian orang Jawa di desa-desa. Kegiatan bertani dimuali dengan mengarap tanah pertanian menjadi telaga atau tanah kering seperti telaga, kebun dan sawah (Kodiran: 327). Kehidupan masyarakat desa terutama nampak dengan adanya tata masyarakat dan ekonomi pertanian yang membedakan dengan tata masyarakat kota. Pada umumnya masyarakat desa dari keluarga petani, dengan bercocok tanam dan bekerja keras dapat memenuhi kebutuhan sendiri dalam melengkapi keperluan hidupnya. Mereka memproduksi pangannya sendiri, sekaligus memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti sandang, peralatan dan lain-lain. Di daerah pedesaan kegiatan masyarakat sangat dominan oleh kegiatan pertanian atau perikanan (Sagjogyo, 1988: 37-40).

Susunan masyarakat pedesaan merupakan satuan yang bersifat lebih homogen dibanding dengan masyarakat perkotaan yang bersifat heterogen. Pada umumnya keadaan masyarakat desa dilihat dari segi sosial mempunyai sifat tolong menolong, gotong royong, dan musyawarah. Apabila menemukan suatu masalah mereka

menyelesaikannya dengan cara. Musyawarah biasanya dilaksanakan untuk memecahkan pertengkaran atau permasalahan kecil atau besar untuk mendamaikan tanpa adanya sifat untuk memenangkan atau mengalahkan salah satu pihak (Sagjogyo,1988:40-43).

Sifat masyarakat desa yang selalu erat dalam hubungan persaudaraan, saling mengenal, kehidupan yang sederhana dan saling menghormati antar sesama masyarakat yang lain. Di masyarakat desa tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari selalu dijaga dan diperhatikan serta saling mengharai terhadap masyarakat yang lain. Sifat kehidupan di desa menurut pandangan umum bahwa masyarakat di pedesaan mudah berhubungan dekat dengan daerah lain serta masyarakat desa juga mudah terpengaruh (M.Cholil, 134-138).

3. Ciri-ciri Masyarakat Pedesaan

Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang tinggal di suatu tempat yang hidup bersama dan tinggal secara menetap di tempat tersebut. Masyarakat sering dibedakan menjadi dua yaitu masyarakat kota dan masyarakat desa. Masyarakat kota adalah sekelompok manusia yang berhubungan dengan kehidupan yang sudah mapan, dengan fasilitas hidup yang modern dan mengikuti kemajuan teknologi yang ada. Sedangkan masyarakat pedesaan mempunyai ciri khusus yaitu sebagai suatu komunitas pada masa lalu selalu berkaitan dengan kebersahaan, keterbelakangan, tradisionalisme, subsistensi, keterisolasian (Raharjo. 1999:184).

Menurut Roucek dan Wareen, masyarakat pedesaan mempunyai karakteristik yaitu:

- a. Mempunyai sifat homogen dalam (mata pencaharian, nilai-nilai kebudayaan serta sikap dan tingkah laku)
- b. Kehidupan desa lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi, artinya semua anggota keluarga turut bersama-sama memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.
- c. Faktor geografis sangat berpengaruh atas kehidupan yang ada misalnya keterikatan
- d. Hubungan sesama anggota masyarakat lebih intim dan lama daripada kehidupan di kota serta jumlah anak pada keluarga inti lebih besar (Jefta Leibo. 1995:7).

Masyarakat di daerah pedesaan yang bertempat tinggal di dataran rendah biasanya, pola kehidupan mereka adalah bercocok tanam di ladang dan sawah, disamping itu juga masyarakat bergantung pada hasil panen tanaman keras seperti,

cengkeh, karet, dan kelapa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tjondronegoro dan Wiradi mengatakan bahwa fungsi sosial dari tanah sebagai tempat tinggal untuk memenuhi kebutuhan papan dan sumber pedapatan sebagai sandaran hidup para petani, tetapi juga mempunyai fungsi-fungsi sosial yang memungkinkan mereka melakukan interaksi dan berkembang (Kurnadi Shahab, 2012:36).

Jadi pada hakekatnya masyarakat pedesaan mempunyai perhatian besar dan saling mempererat hubungan untuk menuju kesejahteraan dan kemajuan, untuk memupuk perasaan sosial dan kecakapan untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat yang lain (M.Cholil, 139).

4. Kehidupan Agama Masyarakat Desa

Klasifikasi masyarakat jawa berdasarkan kepatuhan seseorang dalam mengamalkan syariat agama dapat dilihat dari yang pertama santri, istilah santri biasanya dipakai untuk murid yang mengikuti pendidikan islam, santi berasal dari kata *shastra* yang berti kitab suci, kemudian diturun menjadi kata *shatri* (india) yang berti orang tang tahu kitab-kitab suci (Hindu) (Zaini, 2002: 12). Seorang muslim saleh yang memeluk agama islam dengan sungguh-sungguh dan dengan teliti menjalankan perintah-perintah agama islam. Kedua abangan yang secara harfiah berarti “yang merah”, dari kata *abang* (merah) yakni orang atau muslim jawa yang tidak begitu memperhatikan perintah-perintah agama islam dan kurang teliti dalam menjalankan kewajiban-kewajiban agama (Zaini, 2002: 11).

Kelompok masyarakat desa (jawa) dari segi kebudayaan yakni santri modern, santri kolot, abangan maodern dan abangan kolot , Clifford Geertz melihat bahwa masyarakat jawa dipisahkan beberapa aliran santri, abangan, dan priyayi (Danny Zacharias dkk, 1984:46-48). Para abangan termasuk golongan petani desa dengan kebudaya desa yaitu para petani yang kurang dipengaruhi budaya dari luar dari penduduk lain. Golongan masyarakat jawa yang menerima islam hanya sebagai keyakinan saja tetapi tidak atau jarang menjalankan ibadah sesuai islam dan masih percaya dengan keyakinan nenek moyangannya adalah abangan, kaum abangan pola kehidupannya masih secara sederhana atau tadisional (Zaini, 2002: 15).

Golongan santri merupakan para pedagang yang tinggalnya didaerah-daerah yang lebih bersifat kota, dengan kebudayaannya para musim dengan memegang peraturan agama yang kuat dan biasanya tinggal bersama dikota dalam perkampungan yang dekat dengan masjid. Sedangkan priyayi berhubungan dengan sistem pemerintahan atau peraturan birokrasi. Priyai dikaitkan dengan kebudayaan

kelas atas umumnya golongan bangsawan berpangkat tinggi atau rendah (Zaini, 2002: 5).

5. Topologi atau Bentuk Desa

Dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia No.22 Tahun 1984 tentang konsep desa berubah lagi bersama lahirnya Undang-undang No.5 tahun 1975 yang berisi mengenai topologi desa di Indonesia (Deppen,1984). Topologi oleh Undang-undang No.5 tahun 1975 dimulai dengan yang paling sederhana sampai bentuk yang kompleks namun masih tetap dikategorikan dengan permukiman Indonesia dalam bentuk desa (Bahrein T. Sugihen, 1996: 25).

Topologi desa yang pertama dan paling sederhana (pra-desa) yakni sebagai permukiman sementara tempatnya, mungkin hanya sebagai tempat persinggahan saja dalam satu perjalanan dalam kebiasaan orang-orang yang sering berpindah-pindah tinggalnya atau tidak menetap dalam satu wilayah. Permukiman pra-desa mempunyai ciri tidak ada orang atau keluarga yang menetap atau tinggal di suatu tempat. Semua penghuninya pergi atau pindah setelah panen atau bila lahan sebagai sumber penghidupannya tidak memberikan hasil. Sifat permukiman ini tidak mungkin berkembang dari berbagai tatanan kehidupan dan organisasi penunjang kehidupan sosial seperti pendidikan, ekonomi, hukum, (Bahrein T. Sugihen, 1996: 25-26).

Topologi yang kedua disebut swadaya. Desa ini bersifat sedenter artinya sudah ada kelompok orang atau keluarga tertentu yang bermukim secara menetap, permukiman ini masih tradisional bahwa sumber penghidupannya utama para pedesaan masih berkaitan dengan usaha tani, meramu hasil hutan, beternak dan memelihara ikan di tambak kecil. Teknologi pertanian yang digunakan masih rendah dengan tenaga hewan dan manusia sumber energi utama. Hubungan personal atau kelompok masyarakat berdasarkan pada dan ikatan oleh adat istiadat yang ketat. Pengendalian atau pengawasan sosial berdasarkan asas kekeluargaan, desa swadaya biasanya jauh dari pusat kegiatan ekonomi, jauh dari pusat pendidikan sehingga pendidikan yang ada di desa swadaya masih rendah (Bahrein T. Sugihen, 1996: 26).

Topologi yang ketiga berada pada tingkat Swakarya, adat merupakan tatanan hidup bermasyarakat sudah mulai ada perubahan-perubahan sesuai dengan perubahan yang terjadi pada aspek kehidupan sosial budaya. Adopsi teknologi yang merupakan salah satu sumber perubahan, unsur luar mulai ikut merubah dan

membentuk perilaku masyarakat dari aspek teknologi, dunia kerja atau ekonomi, dalam pendidikan yang lebih baik atau meningkat masyarakat sudah ada yang tamat di sekolah menengah pertama, tetapi banyak yang pada tamat sekolah dasar (Bahrein T. Sugihen, 1996: 26-27).

Bentuk desa yang keempat adalah desa swasembada, pola desa yang terbaik dari topologi desa yang lainnya karena prasarana desa sudah baik, jalan beraspal dan terpelihara dengan baik. Pendidikan sudah bertingkat pada sekolah menengah atas bahkan perguruan tinggi. Mata pencaharian tidak lagi bergantung pada sektor pertanian saja tetapi sudah banyak bervariasi. Masyarakat tidak terlalu berpegangan pada adat istiadat tetapi berpegang pada syariat agama yang berlaku. Masyarakat desa swasembada adalah masyarakat yang sudah terbuka dengan masyarakat luar desanya. Teknologi yang dipakai mulai banyak terlihat dan lebih modern walaupun masih belum merata, masyarakat juga mempunyai kendaraan beroda dua dan empat, angkutan umum relatif mudah diperoleh dan terdapat alat komunikasi seperti telepon dan televisi berwarna dengan parabola (Bahrein T. Sugihen, 1996: 27-28).